

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025  
Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi**

**A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan IV Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	<b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi</b>					
1.1	Indikator 1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	521,4	-	584,1	112
II	<b>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas</b>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	80	80	80	100
III	<b>Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas</b>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,75	125
IV	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional</b>					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	85	85	85	100

Kinerja Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

### **Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi**

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.1. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi**

##### **Latar Belakang**

Peningkatan investasi yang berorientasi pada sektor hilirisasi merupakan salah satu sasaran strategis untuk mendorong realisasi penanaman modal pada industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi mencakup penyederhanaan proses perizinan, optimalisasi insentif, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan regulasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor baik domestik maupun asing. Dalam konteks ini, akselerasi hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri.

Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi menurut BKPM merujuk pada jumlah investasi yang telah direalisasikan dalam bidang hilirisasi. Bidang hilirisasi sendiri merupakan industri pengolahan sumber daya alam yang terbagi menjadi beberapa sektor komoditas antara lain mineral dan batubara, minyak dan gas, serta perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah dengan deregulasi kebijakan kemudahan berusaha melalui revisi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan revisi peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Deregulasi kebijakan diharapkan dapat mempermudah proses bisnis penerbitan izin usaha dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Total nilai investasi realisasi di bidang hilirisasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berasal dari industri pengolahan sumber daya alam yang disampaikan oleh perusahaan PMA dan PMDN setiap triwulan.

##### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 521,4 Triliun. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen RPJMN tahun 2025-2029. Secara kumulatif, hingga triwulan IV tahun 2025, nilai realisasi Penanaman Modal di Bidang

Hilirisasi adalah sebesar 584,1 Triliun atau mencapai 112% dari target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	521,4	584,1	112%

Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi merupakan *cascading* dari indikator kinerja utama Deputy, yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang ditargetkan mencapai Rp1.905,60 triliun pada tahun 2025. Berdasarkan laporan triwulan IV tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai realisasi investasi bidang hilirisasi tercatat sebesar Rp152,7 triliun atau setara dengan 30,7% dari total realisasi investasi nasional pada periode tersebut. Mengacu pada target tahunan sektor hilirisasi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025 sebesar Rp521,4 triliun, realisasi hingga triwulan IV telah mencapai Rp584,1 triliun atau 112% dari target.

Realisasi investasi pada sektor hilirisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan peningkatan sebesar 1,39% secara kuartalan (QtQ). Secara tahunan (YoY), capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor mineral tercatat sebagai kontributor utama dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp81,6 triliun. Diikuti oleh sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp41,1 triliun, sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp27,4 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan yang menyumbang Rp2,6 triliun.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Hilirisasi Komoditas Strategis bersama K/L dan Stakeholder terkait.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Kinerja Road Map Rumput Laut Triwulan II dan Triwulan III tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober 2025.</li> <li>Rapat Koordinasi Pembahasan</li> </ul>

			<p>Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi untuk Komoditas Rumput Laut Tahun 2026 s.d 2030 pada tanggal 31 Oktober 2025 dan 12 November 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Realisasi Pembiayaan Sektor Usaha Komoditas Rumput Laut Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 pada 13 November 2025.</li> <li>• Rapat Pembahasan Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan pada 3 Desember 2025.</li> </ul>
2.	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Investasi dan Kebijakan Hilirisasi Komoditas Strategis berbasis Sumber Daya Hayati (Kelapa/ Garam/ dan lainnya).	Terlaksana	<p>Ekon Goes to Campus Talkshow: Pengembangan Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut, di Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB, Kota Bogor, pada tanggal 1 sd 3 Oktober 2025.</p>
3.	Penyusunan Laporan Penyelesaian Substansi Penyempurnaan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha (Penyelesaian Peraturan Turunan PP No. 28 Tahun 2025).	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 25 Kementerian/Lembaga penerbit peraturan turunan PP No. 28 Tahun 2025, sebanyak 17 peraturan turunan telah diundangkan, 4 peraturan yang sudah selesai harmonisasi dengan Kementerian Hukum, dan 4 peraturan yang belum diselesaikan.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat tingkat eselon I</li> </ul>

			maupun eselon II pembahasan terkait perubahan ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 sektor Pertanian, Kesehatan, Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pangan Nasional, Kehutanan, dan Transportasi.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Matriks RAN Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi 2026-2030 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada 23 Oktober 2025. Adapun tindak lanjut yang direncanakan dari hasil kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Mengoordinasikan percepatan pengembangan industri pengolahan rumput laut (antara lain ATC, SRC, karaginan, dan produk turunannya) melalui sinkronisasi kebijakan dan program kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta calon investor di wilayah potensial.
  - b. Mengoordinasikan fasilitasi pembiayaan dan investasi sektor rumput laut melalui sinergi kebijakan dengan Kementerian Keuangan, perbankan, dan lembaga pembiayaan, termasuk pemanfaatan skema kredit berbunga rendah dan dukungan pembiayaan bagi UMKM.
  - c. Mengoordinasikan penguatan keterhubungan hulu-hilir melalui penyelarasan kebijakan terkait kepastian pasokan bahan baku, peningkatan kualitas dan standardisasi rumput laut, serta penguatan kemitraan antara pembudidaya, koperasi, dan industri pengolahan.
  - d. Mengoordinasikan pengembangan kawasan sentra industri rumput laut melalui sinergi lintas sektor terkait tata ruang, infrastruktur dasar, logistik, dan utilitas pendukung guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
  - e. Mengoordinasikan peningkatan daya saing produk hilir rumput laut melalui penyelarasan kebijakan pengembangan produk bernilai tambah tinggi, perluasan akses pasar domestik dan ekspor, serta penguatan promosi investasi sektor rumput laut.
2. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Kelapa melalui *Collaboration of Indonesia and Japan to Develop SAF Feedstock from Non-Standard Coconut and Pongamia Supported by a Closed Loop System (CLS)*

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Business Forum pada ajang World Expo 2025 Osaka, Jepang, tanggal 9 Oktober 2025 dengan tujuan utama memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui pelaksanaan forum bisnis tingkat tinggi khususnya terkait

*Sustainable Aviation Fuel*. Tindak lanjut dari hasil dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Menindaklanjuti pembangunan pabrik Crude Coconut Oil (CCO) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dimana *groundbreaking*.
  - b. Menindaklanjuti potensi investasi pengembangan pabrik pengolahan kelapa non-standar di kawasan Timur Indonesia, dilakukan peninjauan dengan mitra industri untuk optimalisasi pemanfaatan kelapa non-standar menjadi produk bernilai tambah.
  - c. Menindaklanjuti potensi investasi pengolahan kelapa standar di Kabupaten Banyuasin, telah diidentifikasi peluang kerja sama dengan investor dalam pengembangan industri hilir kelapa.
  - d. Menindaklanjuti potensi pengembangan tanaman jarak sebagai bahan baku bioenergi, saat ini tengah dijajaki peluang investasi untuk pemanfaatan tanaman jarak (*Jatropha curcas*) sebagai sumber minyak nabati alternatif bagi pengembangan bioavtur dan biodiesel, termasuk studi kelayakan awal terkait ketersediaan lahan, produktivitas, dan potensi integrasi dengan sistem pertanian berkelanjutan di wilayah potensial.
3. Mengikuti kegiatan *Business Matching* bertajuk "Akselerasi Investasi Kelapa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan" pada tanggal 29 Oktober 2025 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang. Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat ekosistem investasi di sektor perkebunan, khususnya dalam pengembangan industri hilirisasi kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Tindak Lanjut dari kegiatan tersebut yaitu:
- a. Berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel, BKPM, BRIN, serta K/L terkait untuk memastikan kesiapan seluruh aspek teknis dan administratif menuju kegiatan *groundbreaking* pembangunan pabrik GPP di Banyuasin.
  - b. Mengawal proses penyelesaian AMDAL melalui koordinasi intensif dengan Pemda dan instansi lingkungan hidup agar tidak menjadi hambatan realisasi investasi.
  - c. Mengusulkan pembahasan lanjutan mengenai integrasi sistem traceability kelapa non-standar dalam rantai pasok yang dapat memenuhi persyaratan internasional, khususnya untuk bioavtur.
4. Penyusunan Bahan untuk *Forum Group Discussion* (FGD) Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Rumput Laut

FGD diselenggarakan oleh Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, akademisi dari Universitas Hasanuddin dan ITS. Beberapa hal yang menjadi bahan diskusi pada kegiatan tersebut adalah:

- a. Rumput Laut dapat dijadikan sumber keamanan pangan dengan pemanfaatan teknologi blockchain atau rantai blok, hal ini karena rumput laut merupakan salah satu komoditas kelautan dan perikanan yang cukup besar produksinya di Indonesia. Indonesia sebagai produsen

terbesar ke 2 di dunia setelah China, dan untuk rumput laut tropis Indonesia produsen no 1 di dunia.

- b. Dari sisi prospek bisnis, terdapat produk turunan rumput laut yang sebagian masih diimpor seperti tepung karaginan yang berfungsi sebagai pengemulsi/pengawet dan pengemulsi untuk produk-produk olahan, seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri dan menjadi solusi bagi industri makanan di dalam negeri untuk beralih ke produk lokal (substitusi impor), dengan harga yang cukup bersaing.
- c. Rumput laut sebagai bagian dari ketahanan pangan, karena sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan serat, untuk kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Dapat dikonsumsi segar seperti anggur laut (*Caulerpa*), atau rumput laut spinosum (segar), atau produk turunan seperti agar-agar (khusus untuk jenis *gracilaria*).

5. Mengikuti rapat pembahasan Industri Pengolah dan Produk Olahan Komoditas Perikanan

Rapat membahas kebijakan pemerintah dalam pengembangan pengolahan komoditas prioritas perikanan, perkembangan utilisasi industri pengolah dan produk olahan komoditas prioritas perikanan, pdb industri pengolahan di triwulan III 2025 serta dukungan dari kkp terkait produksi komoditas perikanan. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu:

- a. Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas menyampaikan bahwa terdapat 4 komoditas kelautan dan perikanan yang masuk dalam 15 Komoditas Hilirisasi Prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Rumput Laut, Ikan Tilapia, Udang, dan Ikan Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT).
- b. Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa jumlah industri pengolahan rumput laut sebanyak 55 industri dengan investasi sebesar Rp. 2,3 triliun, namun demikian utilisasi industri pengolahan rumput laut masih sebesar 52% dengan realisasi produksi sebanyak 34 ribu ton/tahun.
- c. Sedangkan untuk industri pengolahan ikan TCT, utilisasi industrinya baru berkisar 50-60%. Arah pengembangan produk TCT didorong untuk pembuatan ikan kaleng, minyak ikan dan kolagen dan gelatin. Sementara untuk komoditas udang, utilisasi industri baru sebesar 51% dengan jumlah pabrik sebanyak 56 pabrik dan kapasitas produksi sebesar 550 ribu ton/tahun.
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan program untuk mendukung produk perikanan dilakukan melalui Kampung Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan melalui Pembangunan cold storage, pabrik es, mobil pendingin dan sentra kuliner.
- e. Kementerian Perdagangan juga mendukung promosi sektor perikanan dengan mengadakan pameran dan misi dagang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Kesimpulan: berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian bahwa rata-rata utilisasi industri pengolahan ikan, udang masih dibawah 60%, perlu upaya bersama untuk mendorong peningkatan utilisasi industri

baik dari sisi hulu yaitu dari peningkatan mutu dan kualitas bahan baku hingga produk di hilir dalam rangka peningkatan nilai tambah.

#### 6. Mengikuti Konsultasi Publik Peta Jalan Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Rempah

Kegiatan diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas pada tanggal 12 November secara virtual. Poin-poin pembahasan penting pada kegiatan tersebut adalah:

- a. Fokus utama diskusi meliputi penguatan riset, rencana pengembangan kawasan produksi rempah, stabilisasi harga, peningkatan daya saing industri pengolahan, dan integrasi kebijakan antar kementerian.
- b. Kementerian Pertanian menyoroti lemahnya pengembangan tanaman obat akibat minim pasar, serta siap menyediakan data produksi dan pelatihan petani.
- c. Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi untuk pengembangan industri jamu dan rempah, serta memberi data dan masukan hilirisasi sektor farmasi dan kimia.
- d. Kemenko Pangan menekankan perlunya kawasan rempah terintegrasi dan ekosistem bisnis rempah dari hulu ke hilir.
- e. Kementerian Koperasi dan UKM memetakan koperasi hilirisasi rempah, menyiapkan data pembiayaan, dan melibatkan deputi terkait.
- f. BKPM menawarkan roadmap hilirisasi pala 2040 yang telah dimiliki dan akan berpartisipasi aktif serta menekankan pentingnya sinkronisasi target antar kementerian.
- g. Bappenas mendorong penguatan aspek infrastruktur, SDM, dan keberlanjutan (ESG) dalam roadmap serta menyusun masukan komprehensif berbasis data, maka Bappenas akan mengkoordinasikan penyempurnaan draft roadmap dan menjajaki pembentukan SDG Entrepreneurial Center penghubung riset-industri.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, menerapkan prinsip *at cost* pada *reimbursement* biaya perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja secara bertahap melalui digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp325.242.196 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk program unggulan dan program prioritas nasional.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Terdapat irisan tugas dan fungsi antara beberapa unit kerja di internal Kemenko Perekonomian, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi

program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dilakukan penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja melalui mekanisme harmonisasi struktur, klarifikasi mandat, dan pembagian peran yang lebih terukur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dengan demikian, potensi irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar-unit dapat terbangun secara berkesinambungan.

2

### Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1. **Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi**

##### Latar Belakang

Terwujudnya Kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya adalah rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 80% yaitu pelaksanaan koordinasi terkait formulasi kebijakan terkait kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi. Adapun target Triwulan IV adalah sebesar 80% dengan capaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 80  Triwulan IV: 80	80	100

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80%. Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan percepatan investasi dan hilirisasi pada triwulan IV 2025 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, yang mana telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha, rapat koordinasi tindak lanjut penanaman PP 28/2025 serta Permen/Perka pada Sistem OSS.

### Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

**2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi**

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN), K/L dan Daerah.	Terlaksana	Hasil diskusi dengan asosiasi, pelaku usaha (PMA dan PMDN), K/L, dan pemerintah daerah terkait solusi permasalahan berusaha telah disampaikan kepada pimpinan tingkat Eselon II.
2.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanaman PP 28 Tahun 2025 serta Permen/Perka pada Sistem OSS.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem OSS PP 28/2025 telah diimplementasikan dengan sebagian besar modul sudah berfungsi 100% yaitu modul Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU.</li> <li>• Untuk Persyaratan Dasar KKPR Darat masih menggunakan proses bisnis PP 5/2021, tetapi dengan tampilan baru sesuai PP 28/2025. KKPR Darat sesuai proses bisnis PP 28/2025 diperkirakan dapat beroperasi pada pertengahan Desember 2025, menunggu kesiapan Sistem Gistaru milik Kementerian ATR/BPN.</li> <li>• Masih diperlukan pengembangan sistem OSS untuk aliran data perizinan berusaha dari K/L Pengampu kepada K/L Pendukung. Misalnya pemenuhan persyaratan/kewajiban yang membutuhkan rekomendasi teknis dari K/L Pendukung yang</li> </ul>

			<p>saat ini masih belum dapat dilakukan melalui sistem OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa modul masih dalam pengembangan, termasuk pengawasan, sanksi, dan kemitraan yang akan diselesaikan pada tahun 2026.</li> </ul>
3.	Penetapan dan Sosialisasi Perpres BUPM	Tertunda dan digeser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan teknis dengan Kementerian/Lemba ga dan konsultasi publik dengan pelaku usaha maupun konsultan hukum telah dilaksanakan.</li> <li>• Draft Batang Tubuh dan Lampiran Perpres BUPM telah disusun</li> <li>• Menunggu arahan pimpinan tinggi mengenai tindaklanjut proses revisi Perpres BUPM</li> </ul>
4.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kemudahan Berusaha	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Prospera dan PwC selama triwulan IV 2025 dengan agenda evaluasi kebijakan perizinan dasar dalam PP No. 28 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, diperoleh ringkasan analisis kesenjangan pada persyaratan dasar sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat penyalarsan tugas dan tanggung jawab antar instansi sehingga menghambat kecepatan pengambilan keputusan</li> <li>• Kapasitas yang terbatas dan/atau kapabilitas Unit Teknis yang tidak memenuhi</li> </ul>

			<p>standar dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau fisik sehingga mempengaruhi kecepatan &amp; konsistensi layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan pelaksana yang ada belum disesuaikan/sinkronisasi dengan PP 28/2025 sehingga menimbulkan ketidakselarasan dan/atau hambatan dalam alur layanan</li> <li>• Redundansi atau pengulangan suatu proses/kegiatan dalam pengajuan Persyaratan Dasar memperlambat pelaku usaha dalam pengurusan Persyaratan Dasar</li> <li>• Sosialisasi dan pelatihan yang kurang merata dan efektif di tingkat daerah terkait pelaksanaan teknis PP 28/2025</li> <li>• <i>Service Level Agreement</i> (SLA) yang belum terhubung dengan indikator kinerja mempengaruhi kepastian dalam pemberian layanan</li> <li>• Beberapa sistem masing-masing instansi belum optimal dalam melayani pengguna sehingga menghambat kelancaran proses perizinan</li> <li>• Integrasi sistem yang belum menyeluruh secara <i>end-to-end</i> membatasi visibilitas progres dan</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>menyebabkan inefisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum secara optimal memanfaatkan infrastruktur teknologi terdepan yang dapat meningkatkan efisiensi dan integrasi.</li> </ul>
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi bersama *the European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham)* untuk mencari solusi atas permasalahan berusaha yang dihadapi, yaitu:
  - a. Pelaku usaha/anggota EuroCham menghadapi permasalahan terkait proses Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya terkait lamanya proses dan kompleksitas prosedur Sertifikasi SNI dan terhambatnya proses legalisasi dokumen dalam Sertifikasi SNI.
  - b. Berdasarkan hasil pembahasan dengan EuroCham, dapat diidentifikasi bahwa:
    - Permasalahan terkait lamanya proses dan kompleksitas prosedur Sertifikasi SNI disebabkan oleh keterbatasan kapasitas lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian serta belum ada penerapan secara pasti mengenai Service Level Agreement (SLA) untuk tenggat waktu layanan.
    - Permasalahan proses legalisasi dokumen dalam Sertifikasi SNI disebabkan oleh tidak sinkronnya regulasi teknis penerapan SNI dengan Konvensi Apostille dan perbedaan pandangan antara K/L terkait.
  - c. Permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti bersama dengan K/L pada awal tahun 2026.
2. Diskusi bersama Tim Prospera sebagai tindak lanjut hasil survei kepada para Chambers of Commerce, sebagai berikut:
  - a. Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adalah kendala perdagangan, perizinan berusaha, ketersediaan energi bersih, kepemilikan asing, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
  - b. Berdasarkan hasil survei tersebut akan disusun rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan.
3. Penyelesaian permasalahan implementasi Jaminan Produk Halal pada industri kosmetik. Poin-poin pokok pembahasan rapat antara lain yaitu:
  - a. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), Asosiasi Industri Kimia Khusus Indonesia (AIKKI), dan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik (PPAK) menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri kosmetik.
  - b. Permasalahan tersebut telah dibahas dan disepakati dalam rapat yang dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perwakilan Kementerian Agama dan asosiasi terkait. Hal-hal yang disepakati diantaranya:

- c. Implementasi wajib sertifikasi halal tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
- d. Masukan asosiasi atas perubahan jenis produk yang wajib bersertifikasi halal akan diakomodir oleh BPJPH.
- e. Aturan tentang sertifikasi halal logistik tetap dilanjutkan namun menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang logistik.
- f. Asosiasi kosmetik akan diundang dalam setiap konsultasi publik atas aturan terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, menerapkan prinsip at cost pada reimbursement biaya perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja secara bertahap melalui digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp 325.242.196 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk program unggulan dan program prioritas nasional.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Belum adanya keseragaman pemahaman di tingkat daerah terkait regulasi pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2025 menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, menghambat konsistensi pelaksanaan program, serta menurunkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melakukan sosialisasi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah, disertai penyusunan pedoman teknis yang jelas dan aplikatif sebagai acuan standar pelaksanaan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis agar interpretasi regulasi lebih konsisten, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keselarasan implementasi antara pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercapai keseragaman pemahaman dan penerapan regulasi sehingga kebijakan dapat berjalan efektif, terukur, dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi**

#### **Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Pengukuran ini dilakukan melalui survei kepada Kementerian, Lembaga, dan stakeholder terkait guna memperoleh umpan balik objektif dan konstruktif.

Survei dilaksanakan menggunakan metode skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4 dan disebarluaskan melalui *platform Google Form* untuk menjangkau responden secara luas dan efisien. Hasil survei ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan di Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Untuk itu, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang percepatan investasi dan hilirisasi yang efektif perlu dilakukan agar dapat memberikan dampak yang optimal berupa kemudahan berusaha, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan struktur industri nasional yang berkelanjutan.

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2025. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait mendapatkan hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pada Triwulan IV 2025, Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melaksanakan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi melalui pemetaan kembali responden yang terdiri dari para stakeholder maupun mitra kerja sama yang selama ini berkoordinasi dengan Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Nilai indeks yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari hasil pelaksanaan survei adalah 3,75 atau kategori puas dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	<b>3,75</b>	125

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Semester II (Triwulan III dan Triwulan IV), realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi mendapatkan hasil 3,75 (Puas).

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, yang mana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Semester II.

Realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025 berhasil dicapai berkat dukungan aktif Kementerian/Lembaga terkait, sehingga koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat berjalan optimal. Dengan adanya dorongan serta rekomendasi kebijakan yang berkesinambungan, indeks kepuasan terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terbukti terpenuhi secara konsisten sepanjang tahun 2025.

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan survei

	Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Semester II.		Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi melalui <i>Google Form</i> kepada K/L dan Stakeholder terkait pada awal bulan Januari 2025.
--	---	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, menerapkan prinsip *at cost* pada reimbursement biaya perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja secara bertahap melalui digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp 325.242.196 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk program unggulan dan program prioritas nasional.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui Rakornis Tingkat Eselon I dan II yang ditindaklanjuti oleh K/L telah terdokumentasi dengan baik. Untuk mendorong peningkatan Indek Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada periode berikutnya, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi saran yang diberikan oleh K/L.

4

#### **Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional**

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi**

##### **Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan presentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun

**Percepatan Investasi dan Hilirisasi**

komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU Reformasi Birokrasi yang wajib didukung adalah Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai, Tingkat Maturitas SPIP, SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan, dan Tingkat Digitalisasi Arsip.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Hingga Triwulan IV 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi mencapai 100% dari target tahun 2025 sebesar 85%. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut telah dipenuhi dengan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV, *draft* Perjanjian Kinerja Tahun 2026, *draft* Manual IKU dan Renaksi, serta optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI yang dapat diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 85  Triwulan IV: 85	85	100

Realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada Triwulan IV 2025 mencapai 100% dari target tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sudah berjalan dengan baik dengan target Triwulan IV sebesar 85% dan target tahun 2025 sebesar 85%. Target tersebut terpenuhi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan kesesuaian kinerja dengan SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2025 terealisasi dengan baik ditopang dengan dukungan tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Ekonomi

yang baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan IV untuk mencapai Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan melakukan penyusunan dan penetapan tim kerja, penyusunan matriks manajemen risiko, penyusunan laporan kinerja triwulan IV, penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025, serta optimalisasi pemanfaatan srikandi yang menunjang pemenuhan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 maka Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Tahun 2025 **terpenuhi**.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

<b>4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW IV</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang dilaporkan pada 14 Januari 2026.
2.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
3.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital SRIKANDI

			untuk surat masuk dan keluar.
--	--	--	-------------------------------

Pelaksanaan kegiatan sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mengoptimalkan fasilitas kantor dan teknologi. Penyelenggaraan kegiatan secara *offline*, *online*, dan *hybrid* dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi selama tahun 2025 sehingga *output* dapat tercapai sesuai pengalokasian anggaran.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, menerapkan prinsip *at cost* pada reimbursement biaya perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja secara bertahap melalui digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Proyeksi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp 325.242.196 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk program unggulan dan program prioritas nasional.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian *output* pada Triwulan IV Tahun 2025 telah terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Adapun upaya perbaikan dalam mencapai target di Triwulan berikutnya yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan RB General ataupun Tematik di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan rencana aksi yang telah disusun.

Jakarta, 14 Januari 2026

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

  
(Ichsan Zulkarnaen)